

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK CARA  
MENENTUKAN UKURAN DAN HARGA DALAM JUAL BELI UDANG**

***VANAMEI***

(Studi Kasus Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten  
Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Kiky Jaya Saputra**

**NPM : 1621030474**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK CARA  
MENENTUKAN UKURAN DAN HARGA DALAM JUAL BELI UDANG**

***VANAMEI***

(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten  
Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Kiky Jaya Saputra**

**NPM : 1621030474**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Pembimbing I : Dr. Alamsyah., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli. Banyak kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tetapi belum diketahui apakah dibenarkan atau tidak dalam pandangan islam. Seperti kegiatan jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan antara petambak dengan para pembeli udang. Dalam cara menentukan ukuran udang *Vanamei* tersebut terdapat adanya unsur *gharar*, sedangkan ukuran udang inilah yang menentukan murah atau mahal nya harga dalam jual beli udang *Vanamei* sehingga bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian akan ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis, menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan data tersebut akan disusun secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang bertujuan sebagai data pendukung terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian, cara menentukan ukuran udang *Vanamei* dilakukan dengan cara sampling 1 kg udang *Vanamei* dari keranjang udang yang telah dibariskan, kemudian jumlah ekor udang dalam sampling 1 kg inilah yang menjadi ukurannya. Lalu harga udang *Vanamei* ditentukan berdasarkan ukuran dari hasil sampling ini yang kemudian harga tersebut akan dikalikan dengan keseluruhan tonase udang *Vanamei*. Praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya diperbolehkan dan juga masyarakatnya sudah terbiasa menerima hasil dari tata cara tersebut. Alasan dalam cara menentukan ukuran udang *Vanamei* hanya langsung disampling saja tanpa dilakukan penyortiran karena akan membutuhkan banyak tenaga dan juga memakan banyak waktu, serta kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai sehingga khawatir kualitas udang tersebut rusak. Hal ini memang sudah dianggap biasa dan dimaklumi serta sudah menjadi tradisi antara pembeli dengan petambak udang. Namun, apabila terdapat adanya unsur kecurangan dalam cara menentukan ukuran udang *Vanamei* tersebut, maka hukumnya tidak sah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiky Jaya Saputra

Npm : 1621030474

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Oktober 2020

Kiky Jaya Saputra  
NPM. 1621030474





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Kiky Jaya Saputra  
NPM : 1621030474  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003

Mengetahui  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl.Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)** disusun oleh **Kiky Jaya Saputra, NPM : 1621030474, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis/15 Oktobber 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : Marwin, S.H.,M.H.**

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud.,M.Ag.**

**Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Alamsyah, M.Ag.**

**Penguji III : Dr. Gandhi Lixorba Indra, M.Ag.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang  
berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  
dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>1</sup>



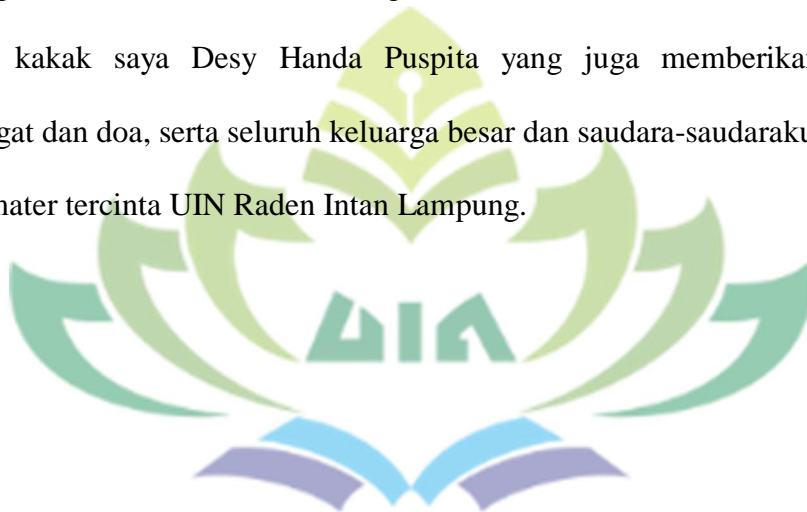
---

<sup>1</sup> QS. An-Nisaa (4) : 29

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Johan Bastari dan Ibunda Midawati atas semua jasa, kasih sayang dan segala pengorbanan dan jerih payah yang dilakukan tanpa batas untuk hidup saya selama ini, serta juga selalu memberikan dorongan semangat, doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil.
2. Untuk kakak saya Desy Handa Puspita yang juga memberikan dukungan, semangat dan doa, serta seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku semua.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Kiky Jaya Saputra, lahir di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada 18 April 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Johan Bastari dan Ibu Midawati.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh yaitu:

1. TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2004.
2. SD Negeri 01 Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 01 Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 01 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, lulus pada tahun 2016.
5. Kemudian melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang), serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir kuliah yang diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan hingga terselesaikannya skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri., M,Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Alamsyah., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Kepada pimpinan perpustakaan dan pengelola perpustakaan UIN Raden Intan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Kepada Bapak Sutanto, S.Pd selaku Kepala Desa Bumi Dipasena Mulya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna untuk penulisan skripsi ini di desa ini.
9. Kepada para petambak dan pembeli udang *Vanamei* yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi serta data data untuk keperluan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung khususnya angkatan 2016.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan selama ini dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih memiliki kelemahan karena keterbatasan



kemampuan penulis, keterbatasan dana, serta keterbatasan waktu. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua yaitu bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2020



Kiky Jaya Saputra  
NPM. 1621030474

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	16
1. Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> )	
a. Pengertian Jual Beli.....	16
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
c. Dasar Hukum Jual Beli .....	28
d. Macam-macam Jual Beli.....	33
e. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	39
f. <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli.....	42
2. Tradisi atau Kebiasaan ( <i>'Urf</i> )	
a. Pengertian dan Dasar Hukum ' <i>Urf</i> .....	46
b. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> .....	48
c. Macam-macam ' <i>Urf</i> .....	49
B. Tinjauan Pustaka.....	52

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Mulya Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang.....	55
1. Kondisi Desa Bumi Dipasena Mulya .....	55
2. Sistem Pemerintahan Desa Bumi Dipasena Mulya .....	64
B. Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang <i>Vanamei</i> di Desa Bumi Dipasena Mulya .....	70
C. Perbedaan Cara Menentukan Ukuran Udang <i>Vanamei</i> di Desa Bumi Dipasena Mulya .....	75

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

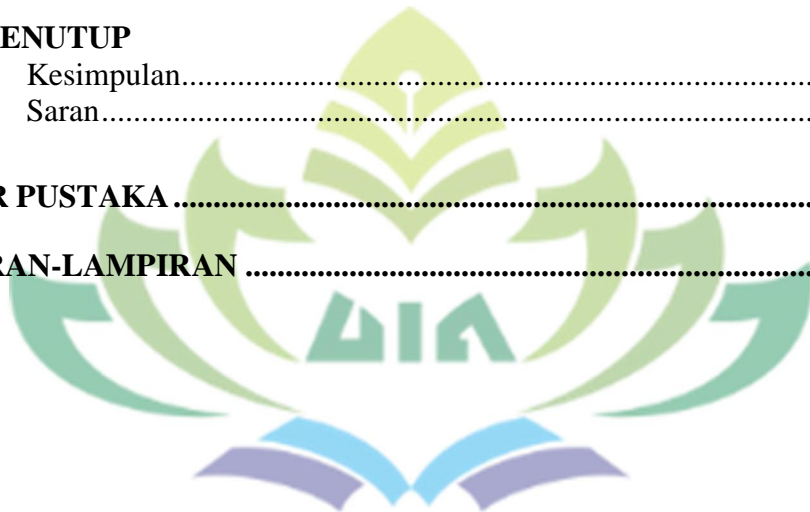
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang <i>Vanamei</i> di Desa Bumi Dipasena Mulya .....	80
--	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Bumi Dipasena Mulya.....	58
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	59
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	60
5. Pekerjaan Penduduk.....	61
6. Jalan Darat .....	62
7. Jembatan .....	62
8. Sanitasi.....	62
9. Sarana Transportasi.....	63
10. Sarana Kesehatan .....	63
11. Fasos dan Fasum .....	64
12. Lembaga Pemerintahan.....	65
13. Lembaga Kemasyarakatan .....	66



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Struktur Pemerintah Desa Bumi Dipasena Mulya .....	67
2. Struktur Ketua RW dan RT Desa Bumi Dipasena Mulya.....	68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, akan di uraikan beberapa kata dari judul skripsi ini, yaitu: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Uraian beberapa kata dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

**Tinjauan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>

**Hukum Ekonomi Syariah**, adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

<sup>2</sup> Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syariah* Vol.20, No.2, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, 2018), h.147-148.



**Menentukan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat menjadi tentu (pasti), menetapkan, memastikan.<sup>3</sup>

**Ukuran**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil mengukur, bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda.<sup>4</sup> Namun, yang dimaksud ukuran udang adalah jumlah ekor udang dalam 1 kg, sehingga apabila semakin banyak jumlah udang dalam 1 kg artinya udang tersebut kecil-kecil dan harga semakin murah. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah ekor udang dalam 1 kg artinya udang tersebut besar-besar dan harga semakin mahal.<sup>5</sup>

**Harga**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.<sup>6</sup>

**Jual Beli**, merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>7</sup>

**Udang *Vannamei***, disebut juga dengan udang putih yang merupakan sumber daya ikan golongan *Crustacea*. Udang ini merupakan spesies asli dari

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.1443.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.1520.

<sup>5</sup> Esta Rosadi, Petambak Udang Dipasena Mulya, wawancara dengan penulis pada 25 Mei 2019

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.482.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2016),h. 135.

perairan Amerika Tengah. Resmi diperkenalkan dan dibudidayakan di Indonesia pada tahun 2000.<sup>8</sup>

Dari yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah membahas tentang bagaimana tata cara dalam menentukan ukuran udang *Vanamei* serta cara menentukan harga udang *Vanamei* sesuai dengan ukurannya yang dilakukan antara petambak dengan pembeli udang. Dalam jual beli udang *Vanamei* tersebut antara ukuran udang dan harga udang adalah hal yang sangat berkaitan, karena ukuran udang lah yang menentukan mahal atau murahnya udang *Vanamei*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei*”:

### **1. Alasan Subjektif**

- a. Permasalahan Tentang Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya sampai saat ini masih terjadi dan penulis tertarik untuk menelitinya.
- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

---

<sup>8</sup> <https://www.dunia-perairan.com/2012/12/udang-putih-vannamei-litopenaeus.html>, diakses pada rabu, 29 mei 2019.

## 2. Alasan Objektif

- a. Terkait permasalahan tentang Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* sudah menjadi tradisi dilakukan di Desa Bumi Dipasena Mulya.
- b. Dalam Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan jual beli dalam islam karena terdapat unsur *gharar* dan bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak, sehingga perlu adanya penelitian dan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang jual beli ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam Bahasa inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu *sale* lebih praktis lagi. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup>

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h.317.



kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>11</sup>

Jual beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya dilakukan antara petambak udang dan pembeli udang *Vanamei*. Jual beli udang *Vanamei* harganya ditentukan berdasarkan ukurannya. Ukuran udang *Vanamei* yang dimaksud adalah jumlah ekor udang per kg. Praktik dalam cara menentukan ukuran dan harga udang *Vanamei* yang menjadi tradisi antara petambak udang dengan para pembeli udang di Desa Bumi Dipasena Mulya terjadi pada saat petambak panen. Udang *Vanamei* yang dipanen dari dalam tambak udang tersebut diangkat dari dalam tambak dan kemudian dimasukkan kedalam keranjang-keranjang udang yang dapat menampung sekitar kurang lebih 40 kg udang *Vanamei*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.318

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 275.

Setelah keranjang-keranjang yang berisi udang *Vanamei* diangkat dari dalam tambak, kemudian keranjang-keranjang tersebut di bariskan untuk melakukan sampling guna menentukan ukuran udang *Vanamei*. Cara melakukan sampling untuk menentukan ukuran udang *Vanamei* yaitu si petambak yang disuruh untuk memilih keranjang yang berisi udang *Vanamei* kemudian mencomot udang *Vanamei* sebanyak 1 kg, sedangkan si pembeli udang selaku mengontrol timbangan sampling. Setelah melakukan sampling udang sebanyak 1 kg, selanjutnya menghitung jumlah ekor udang dari sampling sebanyak 1 kg tersebut. Setelah jumlah ekor udang dihitung, misalnya terdapat 80 ekor udang *Vanamei*, yang artinya itu adalah udang *Vanamei* ukuran 80 ekor per kg.

Setelah ukuran udang *Vanamei* di tentukan, selanjutnya menentukan harga udang *Vanamei* berdasarkan ukurannya. Cara menentukan harga udang *Vanamei* yaitu dengan berpatokan pada standar udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg dengan harga Rp 65.000 di Desa Bumi Dipasena Mulya. Cara menentukannya yaitu apabila setiap bertambah 1 ukuran (jumlah ekor udang) dari standar udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg, maka harganya turun Rp 500 dan seterusnya. Namun sebaliknya, apabila setiap berkurang 1 ukuran (jumlah ekor udang) dari standar udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg, maka harganya naik Rp 500 dan seterusnya. Semakin sedikit jumlah ekor udang dalam 1 kg, artinya udang tersebut besar-besar dan harga semakin mahal. Namun sebaliknya,

semakin banyak jumlah ekor udang dalam 1 kg, artinya udang tersebut kecil-kecil dan harga semakin murah.

Ukuran udang *Vanamei* yang sudah ditentukan tadi adalah udang ukuran 80 ekor per kg, artinya ukuran jumlah udang *Vanamei* tersebut lebih banyak dari standar udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg. Ukuran udang *Vanamei* tersebut jumlahnya bertambah 20 ekor dari standar udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg. Setiap bertambah 1 ukuran (jumlah ekor udang), maka harganya turun Rp 500, Jadi  $\text{Rp } 500 \times 20 = \text{Rp } 10.000$ . Standar harga udang *Vanamei* ukuran 60 ekor per kg yaitu Rp 65.000, jadi  $\text{Rp } 65.000 - \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 55.000$ . Jadi, harga udang *Vanamei* tersebut adalah Rp 55.000.

Setelah ukuran dan harga udang *Vanamei* ditentukan, selanjutnya adalah melakukan penimbangan keseluruhan tonase udang *Vanamei*, dan hasil penimbangan tersebut terdapat 420 kg udang *Vanamei*. Lalu harga udang *Vanamei* yang sudah ditentukan tersebut di kalikan dengan tonase udang *Vanamei*, yaitu  $= \text{Rp } 55.000 \times 420 \text{ kg} = \text{Rp } 23.100.000$ . Jadi, harga jual beli keseluruhan udang *Vanamei* tersebut adalah Rp 23.100.000.

Namun yang jadi permasalahan dalam jual beli udang *Vanamei* tersebut, udang *Vanamei* ukurannya variasi, yang artinya ukuran besar kecil udang *Vanamei* berbeda-beda sehingga ukuran udang *Vanamei* yang ditentukan tersebut tidak akurat, sedangkan ukuran udang *Vanamei* ini lah yang menentukan harganya. Apabila saat melakukan sampling untuk menentukan ukuran udang,

banyak udang yang dicomot oleh petambak adalah udang yang ukurannya besar-besar, maka jumlah ekor udang dalam sampling semakin sedikit dan harga semakin mahal, maka pihak petambak diuntungkan sedangkan pembeli bisa dirugikan. Namun sebaliknya, apabila saat melakukan sampling banyak udang yang di comot oleh petambak adalah udang yang ukurannya kecil-kecil, maka jumlah ekor udang dalam sampling semakin banyak dan harga semakin murah, maka pihak petambak di rugikan dan pihak pembeli yang diuntungkan.

Jadi, dalam praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya tersebut menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> QS. An-Nisaa (4) : 29

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk meneliti terkait permasalahan dengan judul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual beli Udang *Vanamei*” (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang) yang dimana praktik jual beli tersebut sudah menjadi tradisi.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian akan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya.



2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya.

#### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di desa bumi dipasena mulya serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk transaksi jual beli tersebut.
2. Sebagai praktis, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>13</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h.2-3.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari lokasi atau lapangan.<sup>14</sup> Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pemenuhan data primer. Sedangkan data sekunder, penulis mencari buku-buku yang memiliki kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan terkait dengan permasalahan Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang *Vanamei* antara petambak dengan pembeli udang di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Yang menjadi data primer di penelitian ini adalah terdiri dari para petambak dan para pembeli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>16</sup> Data sekunder ini bertujuan guna untuk data pendukung yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Bumi Dipasena Mulya berjumlah sekitar 845 orang petambak udang dan 6 orang pembeli udang (pebisnis udang).

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.1.

<sup>17</sup> Eta Mamang Sangaji dan Sopiha, *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h.48.

## b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>18</sup> Jumlah populasi dalam penelitian ini sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk diteliti semua, bisa dikarenakan keterbatasan tenaga, waktu, serta dana. Sampel yang penulis tentukan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang pembeli udang (pebisnis udang) dan 10 orang penjual (petambak udang) diambil dengan cara non random. Penulis menentukan sampel tersebut dengan penuh pertimbangan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan dengan tujuan penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak semua pihak bisa dijadikan sampel.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana praktik cara menentukan

---

<sup>18</sup> Nuzul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-2, 2007), h.116.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan melakukan tanya jawab kepada para petambak dan pembeli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya selaku narasumber dalam penelitian ini yang terkait dengan praktik cara menentukan ukuran dan harga udang pada jual beli udang *Vanamei* bertujuan untuk memperoleh informasi data yang faktual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, syrat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.<sup>20</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.85.

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Penelitian Research (Metode Penelitian)*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.115.



#### b. Sistematika Data

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup> Sistematika data tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

### 6. Analisis Data

Dari data yang penulis peroleh dalam penelitian ini akan di analisis. Metode analisa dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana pandangan islam tentang praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya. Dari hasil analisis data tersebut maka hasilnya akan disajikan berupa suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan berfikir induktif.

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010), h.126.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli (*Al-Bai'*)

##### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al- Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Fathir:29)<sup>23</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>24</sup> Sebagai etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>25</sup>

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan

<sup>23</sup> QS. Al-Fathir (35): 29

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.21.

<sup>25</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.142.

harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan Kabul dengan cara yang di izinkan syara. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara', jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta secara suka sama suka.<sup>26</sup>

Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar-menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar-menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar-menukar dirham dengan dirham, atau tukar-menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>27</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan

---

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h.156.

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.21.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>28</sup> Kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>30</sup> Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>28</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.141.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), h.193.

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.22.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”<sup>31</sup>

## **b. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

### **1) Rukun Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.<sup>32</sup> Dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>33</sup>

Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu:

- a) Penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.

---

<sup>31</sup> QS. An-Nisaa (4): 29.

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.25.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.75.



- b) Pembeli. Hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c) Barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- d) Kalimat transaksi: Kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, “Juallah barang ini kepadaku.” Penjualnya berkata, “Aku jual barang ini kepadamu.” Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, “Juallah pakaian ini kepadaku.” Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e) Adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan antara kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak

---

<sup>34</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul HAQ), h.636.

bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa kesatuan atau keseluruhan. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun dari kapasitas atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>35</sup>

## 2) Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*In'aqid*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2012), h.102.

(*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (mengandung unsur penipuan), dan lain-lain.<sup>36</sup> Adapun syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>37</sup>

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.76.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2016), h.

- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.<sup>38</sup>

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan Kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan sempurna.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.26.

- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>39</sup>

Sementara syarat yang terkait ijab dan Kabul ada tiga, yaitu:

- a) Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.

Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat sigat akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.

- b) Kesesuaian antara Kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayaran.

- c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.26-27.

atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.<sup>40</sup>

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>41</sup>

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata)

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.28.



- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.<sup>42</sup>

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- b) Diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*.
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- d) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.28.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.29.

Selain syarat tersebut, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c) Bebas dari *gharar*.
- d) Bebas dari riba.<sup>44</sup>

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.29.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.30.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>46</sup>

### c. Dasar Hukum Jual Beli

#### 1) Menurut Al-Qur'an

##### a) QS. An-Nisaa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.76.

<sup>47</sup> QS. An-Nisaa (4): 29

b) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."<sup>48</sup>

c) QS. Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 275

kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”<sup>49</sup>

d) Q.S. Fatir (35) ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”<sup>50</sup>

2) Menurut Al-Hadits atau As-Sunnah

a) Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ  
يَحْيَى قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa’ah ibn Rafi’ ibn Khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”.

<sup>49</sup> QS. Al-Baqarah (2): 198

<sup>50</sup> QS. Fatir (35): 29

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijma tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/ imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>51</sup>

b) Rasulullah SAW Bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan saling merelakan”

(HR. Ibnu Majah)<sup>52</sup>

c) Dalam riwayat at-Tarmizi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِنُ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه لترمزي)

“Dari Abu Sa’id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah SAW bersabda; Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.65.

<sup>52</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fan Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.68.

di surga) dengan para Nabi, para sidikin, dan para syuhada” (H.R. Tarmizi)<sup>53</sup>

### 3) *Ijma'*

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>54</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>55</sup>

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

<sup>53</sup> Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, jus III, Beirut: daar Al-Fikri, h.515.

<sup>54</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.22.

<sup>55</sup> Rachmat Syafei., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75



Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>56</sup>

#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli tergolong menjadi jual beli *Shahih* dan jual beli *Ghairu Shahih*. Jual beli *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.<sup>57</sup> Jual beli *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.<sup>58</sup> Jual beli *Ghairu Shahih*, terbagi menjadi jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu:

- 1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan hak milik karena ia dipandang tidak pernah ada.<sup>59</sup> Jenis-jenis jual beli bathil adalah:

---

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.25.

<sup>57</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.121

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.71.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.71-72.

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualkan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
  - b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
  - c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang di tumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
  - d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.
  - e) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.<sup>60</sup>
- 2) Jual beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu rusak.<sup>61</sup> Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

---

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 171.

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.80.

a) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan).

Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara. Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, “saya akan jual mobil ini bulan depan” namun, pelaksanaan akadnya bulan ini.<sup>62</sup>

c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak khiyar ru'yah. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak khiyar. Sementara itu, Syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.80.

- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Misalnya Tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B dengan harga 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut ulama Malikiyah dinamakan dengan *bai 'inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli ini bathil. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan jual beli ini fasid. Menurutnya, jual beli seperti ini dipandang hilah dan riba.<sup>63</sup>
- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat khamr. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil.<sup>64</sup>
- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “Saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya” atau dengan ungkapan lain: “Saya beli barang ini Rp

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h.81.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.82.

2.000., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”.

Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini bathil.<sup>65</sup>

Bila dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
- 3) Jual beli *Muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>66</sup>

Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.83.

<sup>66</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.174.

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
  - b) Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.<sup>67</sup>

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

---

<sup>67</sup> *Ibid*,h.174-175.

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
  - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
  - b) Jual beli *istishna'* yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>68</sup>

#### e. Prinsip-prinsip Jual Beli

Secara garis besar, prinsip-prinsip dalam jual beli dalam islam adalah:

Pertama, prinsip suka sama suka (*'an taradhin*), Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.175.



dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhayli, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah *'an taradhin* (suka sama suka) itu.<sup>69</sup> Sebagaimana dalam firman Allah pada Q.S An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, Kecuali bila berlaku tijarah atas dasar suka sama suka”<sup>70</sup>

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.<sup>71</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muthaffifin (83) ayat 1-7:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا  
 كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

<sup>69</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi* (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h.179.

<sup>70</sup> Q.S An-Nisaa (4): 29

<sup>71</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi* (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h.179-180.

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ  
الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya: “Kecelakaanlah besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang benar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri mengharap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijjin.”<sup>72</sup>

Ketiga, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.<sup>73</sup>

Hal ini dapat dilihat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>72</sup> QS. Al-Muthaffifin (83): 1-7

<sup>73</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h.180.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>74</sup>

#### **f. *Gharar* dalam Jual Beli**

Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastru al-aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>75</sup> Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di air. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas.<sup>76</sup>

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab

---

<sup>74</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282

<sup>75</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.77.

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.38.

tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti.<sup>77</sup>

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*”<sup>78</sup>

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya, diantara contoh *gharar*, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka *gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang terluas. Oleh karena itu, dalam praktiknya hampir setiap praktik bisnis terlarang itu terdapat unsur *gharar* didalamnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h.647.

<sup>78</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 78.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 79.

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan.

#### 1) *Gharar* Berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

“*Gharar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”.

Atau singkatnya, *Gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Jika tradisi pasar mengkategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

Diantara contoh-contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘urf (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh

karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).<sup>80</sup>

## 2) *Gharar* Ringan

Yang dimaksud *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, membeli buah-buahan yang ada didalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.82.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h.83.

## 2. Tradisi atau Kebiasaan (*'Urf*)

### a. Pengertian dan Dasar Hukum *'Urf*

*'Urf* secara Bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *'urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>82</sup>

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>83</sup>

Dasar Hukum *'Urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam islam yaitu:

1) Firman Allah pada surat al-A'raf ayat (7):

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>82</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 167.

<sup>83</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.81-82.



“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>84</sup>

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.<sup>85</sup>

2) Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas’ud:

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ  
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang

<sup>84</sup> QS. Al-A’raf (7): 199

<sup>85</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h.212.

dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>86</sup>

Selain ayat diatas uruf dapat dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana tidak bertentangan dengan ketentuan al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>87</sup>

#### **b. Syarat-syarat ‘Urf**

Bagi para mujtahid yang menjadikan uruf sebagai sumber hukum dalam islam diperlukan syarat-syarat sbb;

- 1) ‘Urf tersebut tidak bertentangan dalil *qath’iy*; uruf yang bertentangan dengan dalil *qath’iy* tidak dapat dipakai sebagai dalil hukum karena

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.169-170.

kehujjahan '*urf*' baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang dzanni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk dalilnya, maka '*urf*' tersebut berfungsi sebagai takhsis daripada dalil yang dzanni.

- 2) '*Urf*' tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.
- 3) '*Urf*' harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.<sup>88</sup>

### c. Macam-macam '*Urf*'

- 1) Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' terbagi kepada:

- a) '*Urf Qauli*'

Ialah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut Bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut Bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan air, Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 173.

daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).

b) *'Urf amali*

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>89</sup>

2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* terbagi kepada:

a) *'Urf sahih*

Ialah *'Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b) *'Urf fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal

---

<sup>89</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.82-82.

ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.

3) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, '*urf*' terbagi kepada:

a) '*Urf 'aam*

Ialah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.<sup>90</sup>

b) '*Urf khas*

Ialah '*urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara islam lain tidak dibiasakan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.83.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h.84.

## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat tentang beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dijadikan referensi oleh penulis sekaligus untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian oleh penulis. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan (*Studi pada agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang, Lampung*). Penelitian ini di susun oleh Safly Andica Rahwan (2018) UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya yaitu bagaimana praktek jual beli udang vaname yang dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya. Kesimpulan dari penelitiannya adalah jual beli udang vaname yang dibekukan tidak sah karena tidak sesuai ketentuan hukum islam karena mengandung unsur penipuan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Safly Andica Rahwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan", (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak (*Studi di Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang*). Penelitian ini disusun oleh Ayu Liana (2019) UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitiannya yaitu bagaimana praktik jual beli udang yang masih didalam tambak yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan Bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli udang yang masih didalam tambak yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Kesimpulan dari penelitiannya adalah jual beli udang yang masih didalam tambak tidak sah karena syarat objek tidak terpenuhi, yaitu barang tidak dapat diserahkan dan pada saat terjadinya transaksi barangnya tidak diketahui ukuran, kualitas, dan kuantitasnya.<sup>93</sup>

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penetiti terdahulu, perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian yang dibuat oleh Safly Andica Rahwan, fokus permasalahannya membahas tentang jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian yang dibuat oleh Ayu Liana, fokus permasalahannya membahas tentang jual beli udang yang masih didalam tambak di Desa Bumi Dipasena

---

<sup>93</sup> Ayu Liana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Didalam Tambak", (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019)



Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, fokus permasalahannya membahas tentang praktik tata cara dalam menentukan ukuran udang dan harga udang dalam jual beli udang *Vanamei* di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, jus III, Beirut: daar Al-Fikri.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul HAQ.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2016),h. 135.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim, Adiwarman A. dan Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Liana, Ayu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Didalam Tambak”, Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2012.
- ....., *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- ....., *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Research (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2008.
- Rahwan, Safly Andica "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan", Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fan, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sangaji, Eta Mamang dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2003.

Zuriyah, Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-2, 2007.

### **Sumber Online**

<https://www.dunia-perairan.com/2012/12/udang-putih-vannamei-litopenaeus.html>, diakses pada rabu, 29 mei 2019.

Kholid, Muhammad, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Asy-Syariah Vol.20, No.2, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, 2018.

Nur, Efa Rodiah, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No. 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

